

TELAAH TENTANG MADRASAH MU'ALLIMAT MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA MASA ORDE BARU (1974-1998)

Penulis 1 : Irza Fathnurrohma
Penulis 2 : Dr. Dyah Kumalasari, M.Pd.
Universitas Negeri Yogyakarta
Irza_shasa@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) latar belakang berdirinya madrasah di Yogyakarta, (2) perkembangan Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta pada masa Orde Baru (1974-1998), (3) pengaruh kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah oleh Kuntowijoyo yang terdiri dari 5 tahap. Tahap yang pertama adalah pemilihan topik. Tahap kedua adalah pengumpulan sumber baik sumber primer maupun sekunder. Tahap ketiga adalah verifikasi atau kritik sumber. Tahap keempat adalah interpretasi untuk menafsirkan fakta-fakta sejarah yang ditemukan. Tahap kelima adalah historiografi atau penulisan sejarah. Sumber yang digunakan seperti arsip, buku rekap, Laporan Pertanggung Jawaban Madrasah Mu'allimat, majalah Suara Muhammadiyah dan lain-lain.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Latar belakang berdirinya madrasah di Yogyakarta meliputi perkembangan madrasah sebelum Orde Baru, perkembangan madrasah masa Orde Baru dan latar belakang berdirinya Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Madrasah tumbuh karena masjid-masjid dirasa penuh untuk proses belajar dan berkembangnya ilmu pengetahuan. Madrasah sebelum dan masa Orde Baru diatur oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Salah satu madrasah yang merasakan kebijakan pendidikan Orde Baru ialah Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan. (2) Perkembangan Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta masa Orde Baru (1974-1998) meliputi sistem pendidikan, kurikulum, sarana prasarana, tenaga pengajar dan peserta didik. Perkembangannya mengikuti kurikulum yang ditetapkan Kementerian Agama dan kurikulum Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Peserta Didik dapat menempuh jenjang 6 tahun dengan pembagian jenjang yaitu 3 tahun jenjang Tsanawiyah dan 3 tahun jenjang Aliyah. (3) Pengaruh kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta menjadikan Madrasah Mu'allimat dapat mengikuti ujian persamaan. Lulusan Madrasah Mu'allimat mendapatkan ijazah formal yang dapat digunakan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi walaupun fungsi kaderisasi Muhammadiyah sedikit mengalami penurunan.

Kata kunci: Madrasah Mu'allimat, Muhammadiyah, Yogyakarta, Orde Baru.

MADRASAH MU'ALLIMAT MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA IN THE NEW ORDER ERA (1974-1998)

Irza Fathnurrohma
12406241044

ABSTRACT

This study aimed to investigate: (1) the background of the establishment of Islamic schools in Yogyakarta, (2) the development of Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta in the New Order era (1974-1988), and (3) the influence of the New Order government's policies on Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta.

The study employed the historical research method by Kuntowijoyo consisting of 5 stages. The first was topic selection. The second was collection of sources, both primary and

secondary sources. The third was verification or source criticism. The fourth was interpretation to interpret historical facts that were found. The fifth was historiography or history writing. The sources used included archives, recap books, accountability reports of Madrasah Mu'allimat, Suara Muhammadiyah magazine, and others.

The results of the study were as follows. (1) The background of the establishment of Islamic schools in Yogyakarta included the development of Islamic schools before the New Order, the development of an Islamic school during the New Order, and the background of the establishment of Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Islamic schools grew because mosques were not adequate for learning processes and scientific knowledge development. Islamic schools before the New Order were regulated by the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. One of the Islamic schools affected by the educational policies during the New Order was Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta established by K.H. Ahmad Dahlan. (2) The development of Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta in the New Order era (1974-1988) included the educational system, curriculum, infrastructure facilities, teachers, and students. The development followed the curriculum set by the Ministry of Religious Affairs and the curriculum of Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. The students could take the 6 year level, consisting of the 3 year level for *tsanawiyah* (junior high school) and the 3 year level for *aliyah* (senior high school). (3) The influence of the New Order government's policies on Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta made Madrasah Mu'allimat able to take the equivalency examination to obtain the formal diploma that could be used to continue to a higher level although the function of Muhammadiyah regeneration slightly decreased.

Keywords: *Madrasah Mu'allimat, Muhammadiyah, Yogyakarta, New Order*

I. Pendahuluan

Sekolah Islam atau pendidikan Islam telah mengalami berbagai macam pembaharuan. Pendidikan Islam mengalami perubahan dan perkembangan format mulai dari langgar, masjid, pesantren hingga format pembaharuan yaitu dalam bentuk madrasah.¹ Madrasah tumbuh karena adanya faktor bahwa masjid-masjid dirasa sangat penuh sehingga mengganggu proses peribadahan. Hal lain yang menjadi faktor yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan sehingga perlu pembelajaran yang lebih aktif dan inovatif. Di dalam madrasah ini pengajaran diberikan di dalam kelas, mempergunakan bangku, meja dan papan tulis.²

Pada era Orde Lama, madrasah belum masuk dalam sistem pendidikan nasional akan tetapi masih berada di bawah naungan Menteri Agama. Hal ini disebabkan karena pendidikan madrasah belum didominasi oleh muatan-muatan agama, belum menggunakan kurikulum yang terstandar, memiliki struktur yang tidak seragam, dan kurang terpantau manajemen madrasah oleh pemerintah.³ Pemerintah

¹ Madrasah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah tempat belajar. Padanan madrasah dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sekolah dan lebih dikhususkan lagi diartikan sebagai sekolah-sekolah agama Islam. Dalam *Shorter Encyclopaedia of Islam*, madrasah diartikan sebagai nama dari suatu lembaga di mana ilmu-ilmu keislaman diajarkan. Lihat Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm.93.

² B. J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970*. (Jakarta: Grafiti Press, 1985), hlm.121.

³ Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm.360.

secara berangsur-angsur memperbaiki mutu pendidikan madrasah dengan memberikan perhatian serius bagi sekolah negeri maupun swasta.

Masuk era Orde Baru mulai dari tahun 1966, pemerintah melanjutkan dan memperbaiki kebijakan pemerintah Orde Lama tentang madrasah. Pemerintah berupaya melakukan formalisasi dan strukturisasi madrasah. Formalisasi dilakukan dengan menegerikan sejumlah madrasah, sedangkan strukturisasi dilakukan dengan mengatur jenjang dan kurikulum sekolah.

Perkembangan madrasah masa Orde Baru dibagi menjadi dua tahapan. Pertama, perkembangan madrasah sebelum Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989. Perkembangan tersebut ditandai dengan diadakan sidang kabinet terbatas pada tanggal 26 November 1974 yang salah satu hasilnya adalah kesepakatan yang dikeluarkan oleh tiga menteri (Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Dalam Negeri) yang dikenal SKB Tiga Menteri tahun 1975.⁴ Kesepakatan tiga menteri itu menjadikan kesetaraan antara madrasah dan sekolah umum. Kedua, perkembangan madrasah dalam pelaksanaan Undang-Undang RI No. 2 tahun 1989 tentang Sispnas.⁵

Perkembangan madrasah didukung oleh organisasi-organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Nadhatul 'Ulama, Persatuan Umat Islam, dan organisasi-organisasi lainnya. Salah satu tokoh dari organisasi tersebut yang menjadi pelopor perkembangan madrasah di Indonesia ialah KH. Ahmad Dahlan. Kyai Haji Ahmad Dahlan merupakan tokoh yang berhasil mendirikan organisasi pergerakan yang lebih dikenal dengan nama Muhammadiyah.

Muhammadiyah telah mendirikan beberapa model pendidikan seperti pondok pesantren, pendidikan luar sekolah, taman kanak-kanak, pendidikan sekolah dasar, pendidikan menengah atau madrasah dan lain-lain. Tujuan pendidikan tersebut adalah meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa Indonesia secara lahir-batin.⁶ Salah satu sekolah menengah atau madrasah yang tertua dan memiliki peran besar dalam pendidikan adalah Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta.

Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1918 dengan nama *Al Qismul Arqo*. Pada tahun 1921 *Al Qismul Arqo* diubah menjadi Pondok Muhammadiyah, lalu tahun 1923 diubah lagi menjadi

⁴ SKB Tiga Menteri itu dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 1975 di Jakarta oleh Menteri Agama RI, DR. Mukti Ali, MA, Nomor 6 Tahun 1975, Menteri P&K Nomor 037/U/1975, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1975. Keputusan bersama tersebut merupakan pelaksanaan dari Keputusan Presiden No. 15 tahun 1972 dan Instruksi Presiden No. 15 tahun 1974 sesuai dengan petunjuk presiden pada sidang kabinet terbatas tanggal 26 November 1974. Lihat Alamsyah, *Pembinaan Pendidikan Agama*. (Jakarta: Depag RI, 1982), hlm.138.

⁵ Peraturan tersebut dibuat dalam rangka pengembangan madrasah menjadi sekolah umum. Lihat selengkapnya dalam Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam: Perubahan Konsep, Filsafat dan Metodologi dan Era Nabi SAW sampai Ulama Nusantara*. (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), hlm.358.

⁶ Yunahar Ilyas, M Masyhur Amin, M Daru Lalito, *Muhammadiyah dan NU*. (Yogyakarta: LPPI UMY, 1994), hlm.53.

Kweekschool Islam dan tahun 1924 berubah menjadi *Kweekschool* Istri. Pada tahun 1924, *Kweekschool* Islam dipisah antara putra dan putri. *Kweekschool* Putra menjadi Madrasah Mu'allimin, sedangkan *Kweekschool* Putri menjadi Madrasah Mu'allimat.⁷

Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta merupakan madrasah dengan jenjang 6 tahun untuk membentuk calon pendidik dan pemimpin putri. Madrasah Mu'allimat terdiri dari Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah merupakan jenjang sekolah Menengah Atas setingkat dengan SMA, sedangkan Madrasah Tsanawiyah merupakan sekolah menengah pertama atau setingkat dengan SMP.

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan telaah terhadap pustaka atau literatur yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian.⁸ Kajian pustaka terkait dengan literatur yang digunakan penulis sebagai landasan dalam penelitiannya. Rumusan masalah pertama yaitu menjelaskan latar belakang berdirinya Madrasah di Yogyakarta dengan menggunakan buku karya Maksud yang berjudul *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya*, diterbitkan oleh Logos Wacana Ilmu tahun 1999. Buku ini membahas tentang perkembangan madrasah dan kebijakan pemerintah mengenai pendidikan madrasah. Pembahasan dimulai sejak masa penjajahan di Indonesia hingga masa Reformasi.

Buku lain yang digunakan yaitu buku karya Haidar Putra Daulay yang berjudul *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, diterbitkan oleh Kencana Perdana Media Grup tahun 2007. Buku ini membahas tentang pengertian madrasah dan perkembangan madrasah dari masa ke masa yang pada akhirnya fokus pada masa Orde Baru.

Sumber lain yang digunakan adalah buku karya Mujamil Qomar yang berjudul *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, diterbitkan oleh Erlangga. Buku tersebut membahas tentang madrasah sebagai sarana pembaharuan dalam pendidikan. Awalnya pengajaran Islam di ajarkan di langgar-langgar, masjid hingga pesantren. Pada abad ke-19, madrasah dikembangkan untuk menggabungkan metode pembelajaran agama Islam dengan ilmu pengetahuan. Pembelajaran pada madrasah dilakukan di dalam ruang kelas dengan menggunakan kursi, meja dan papan tulis. Perkembangan madrasah dikupas secara lengkap mulai dari awal terbentuknya madrasah yang digunakan untuk mengungguli sekolah-sekolah Belanda sebelum masa kemerdekaan hingga berkembang menjadi madrasah yang diakui oleh pemerintah pada masa Orde Baru.

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1946, Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1950 dan SKB Tiga Menteri Tahun 1975, dapat dipahami bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran pokok atau dasar di samping itu juga diajarkan mata pelajaran umum.⁹ Peraturan-peraturan tersebut mempermudah langkah

⁷ Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. *Booklet Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta*, (Yogyakarta: Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), hlm.2.

⁸ Jurusan Pendidikan Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah FIS UNY*, (Yogyakarta: Prodi Pendidikan Sejarah FIS UNY, 2013), hlm.3.

⁹ Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di*

madrasah dalam mengembangkan perannya di dunia pendidikan. Lulusan madrasah secara sadar diakui oleh masyarakat dan bisa bersaing dengan sekolah umum lainnya.

Perkembangan sistem Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta menggunakan buku yang ditulis oleh Abdurrahman Saleh dan Saadod'ddin Djambek berjudul *Sarana Pelaksanaan Kurikulum Baru Madrasah Negeri*. Buku ini diterbitkan berdasarkan proyek penelitian agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada tahun 1975/1976. Buku ini membahas tentang kurikulum madrasah dan kurikulum sekolah umum masa Orde Baru yang dimulai dengan adanya SKB Tiga Menteri.

Kebijakan yang dihadapi Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta masa Orde Baru menggunakan artikel karya Maria Ulfa Azhar berjudul *Mu'allimat, Mampukah menjadi Gontornya Muhammadiyah?* tahun 1995 dalam Suara Muhammadiyah No. 21/80/1995. Artikel ini membahas tentang kesulitan yang dihadapi Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta dalam menghadapi perkembangan sains dan teknologi. Lulusan Mu'allimat merupakan aset Muhammadiyah yang memiliki pengetahuan luas, berjiwa pemimpin, dan dapat menjadi sarana dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi seperti kemiskinan, lemahnya pendidikan, dan lain sebagainya.

Artikel lain yang digunakan yaitu artikel karya Sri Mulyaningsih berjudul Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta dalam Suara Muhammadiyah No. 14/77/1992. Artikel ini membahas tentang beberapa kegiatan madrasah dan sarana prasarana. Artikel ini sedikit membahas tentang prestasi yang dicapai Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta.

B. Metode Penelitian

1. Pemilihan Topik

Pemilihan topik merupakan tahap awal dalam penelitian sejarah. Tahap ini digunakan untuk menentukan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian sejarah. Topik penelitian dipilih berdasarkan dua kedekatan, yaitu kedekatan emosional dan kedekatan intelektual.

Peneliti memilih topik Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta masa Orde Baru. Alasan penulis memilih topik tersebut berdasarkan kedekatan emosional yaitu Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta merupakan satu-satunya sekolah perempuan Muhammadiyah yang masih bertahan sampai sekarang. Madrasah Mu'allimat tersebut berada di Yogyakarta yang pada dasarnya merupakan kota kelahiran Muhammadiyah sendiri. Yogyakarta dekat dengan kampus dan tempat tinggal penulis. Selain itu, peneliti nantinya akan bekecimpung dalam dunia pendidikan, sehingga peneliti ingin melakukan penelitian tentang topik sejarah pendidikan di Indonesia.

Kedekatan emosional dibersamai dengan kedekatan intelektual. Kedekatan intelektual dalam penelitian ini yaitu peneliti ingin memberikan sumbangsih berupa karya sejarah bagi dunia pendidikan di Indonesia supaya bermanfaat bagi khasanah ilmu pengetahuan. Peneliti juga ingin menunjukkan kepada pembaca tentang pendidikan Islam dan Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta pada masa Orde Baru.

2. Heuristik

Heuristik merupakan tahapan kedua dalam penelitian sejarah. Tahapan ini merupakan tahap pengumpulan sumber, data dan informasi yang relevan. Sumber dapat dicari melalui berbagai buku, dokumen atau arsip, koran, artikel, bahan-bahan arkeologis dan bahan lain yang dapat dijadikan sumber penelitian. Heuristik dibagi menjadi 2 yaitu primer dan sekunder.

Sumber Primer adalah kesaksian daripada seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan pancaindera yang lain atau dengan alat mekanis.¹⁰ Sumber primer yang dipakai antara lain dokumen atau data statistik berupa data siswa, data guru dan data karyawan Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1991-1998, arsip berupa ijazah tahun 1982 dan rapor tahun 1976 sampai 1982 milik Fauziah Tri Astuti. Arsip lain berupa Surat Keputusan terkait Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Wawancara dengan 2 mantan direktur Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta yaitu Dra. H. Siti Zunnah yang menjabat tahun 1979-1994 dan Dra. Fauziah Tri Astuti yang menjabat tahun 2005-2014.

Sumber Sekunder merupakan sumber yang diperoleh dari orang yang tidak terlibat langsung dalam sebuah peristiwa. Sumber-sumber sekunder yang peneliti gunakan antara lain sebagai berikut: Abdurrahman Saleh dan Saadod'ddin Djambek. 1975. *Sarana Pelaksanaan Kurikulum Baru Madrasah Negeri*. Jakarta: Proyek Penelitian Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Haidar Putra Daulay. 2007. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. 2015. *Booklet Madrasah Muhammadiyah Yogyakarta*. Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Tanpa Tahun. *Profil Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta*, Mahmud Yunus. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. 1979. Jakarta: Mutiara, Maksun. *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya*. 1999. Jakarta: Logos Wacana, Mujamil Qomar. Tanpa Tahun. *Pesantren*. Jakarta: Erlangga, Ramayulis. *Sejarah Pendidikan Islam: Perubahan Konsep, Filsafat, dan Metodologi dan Era Nabi SAW sampai Ulama Nusantara*. 2011. Jakarta: Kalam Mulia, Samsul Nizar. 2009. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Selain buku penulis juga menggunakan sumber majalah yaitu: Maria Ulfa Azhar. 1995. Mu'allimat, Mampukah menjadi Gontornya Muhammadiyah?. *Suara Muhammadiyah*. No. 21/80/1995, Sri Mulyaningsih. 1992. Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. *Suara Muhammadiyah*. No. 14/77/1992.

3. Verifikasi

Kritik sumber sejarah (Verifikasi) adalah upaya untuk mendapatkan otentitas dan kredibilitas sumber.¹¹ Kritik sumber terdiri dari kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal digunakan untuk menguji secara fisik keaslian atau otentitas suatu sumber yang dipakai. Kritik ini dilakukan dengan cara meneliti jenis kertas, ukuran kertas, ukuran tulisan, tinta yang digunakan, jenis tulisan

¹⁰ Louis Gottschalk, *Understanding History: A Prime of Historical Method*, a.b. Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*. (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.35.

¹¹ Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.35.

dan semua hal yang berkaitan dengan fisik penelitian di luar isi yang ditulis. Kritik internal digunakan untuk menguji kredibilitas atau kesahihan sumber terkait dengan isi yang ditulis.

4. Interpretasi

Interpretasi merupakan tahap penafsiran terhadap data-data yang diperoleh. Interpretasi dilakukan untuk mengetahui fakta-fakta sejarah hingga pada akhirnya akan tersusun suatu fakta yang logis dan bermakna. Interpretasi terdiri dari dua macam, yaitu analisis dan sintesis. Analisis digunakan untuk menentukan fakta dari data yang diperoleh karena di dalam suatu data terkandung banyak kemungkinan. Sintesis berarti menyatukan, yaitu data-data yang diperoleh dikumpulkan dan dikelompokkan untuk disatukan atau disimpulkan.

Penulis menggunakan metode analisis dan sintesis dalam penulisan ini. Penulis menggunakan analisis untuk menguraikan kebijakan pendidikan yang dihadapi Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta masa Orde Baru (1974-1998). Penggunaan metode analisis oleh penulis didasarkan pada hasil sintesis yang sudah dilakukan sebelumnya.

5. Historiografi

Tahap terakhir dalam penelitian sejarah adalah tahap penulisan. Dalam penulisan sejarah, aspek kronologis sangat penting.¹² Peneliti melakukan analisis dan sintesis yang kemudian diwujudkan dalam bentuk karya sejarah. Peneliti menyusunnya secara kronologis untuk menyajikan sebuah fakta dalam tulisan.

Penulis menuliskan kondisi madrasah masa Orde Lama, Orde Baru dan Latar Belakang berdirinya Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta pada bagian pengantar. Hasil penelitian berisi sistem pendidikan Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta dan kebijakan pendidikan yang dihadapi selama Orde Baru (1974-1998). Kesimpulannya berisi hasil akhir yang menjawab rumusan masalah berdasarkan fakta yang ditemukan.

II. Pembahasan

A. Latar Belakang Berdirinya Madrasah di Yogyakarta

1. Perkembangan Madrasah Sebelum Orde Baru

Madrasah masa Orde Lama belum masuk dalam sistem pendidikan nasional akan tetapi masih berada di bawah naungan Menteri Agama. Hal ini disebabkan karena pendidikan madrasah belum didominasi oleh muatan-muatan agama, belum menggunakan kurikulum yang terstandar, memiliki struktur yang tidak seragam, dan kurang terantau manajemen madrasah oleh pemerintah.¹³ Banyak di antara umat muslim yang ingin mengembangkan pendidikan bernuansa Islam, namun terkendala oleh kebijakan pemerintah yang belum terorganisir dengan baik. Pemerintah secara berangsur-angsur memperbaiki mutu pendidikan madrasah dengan memberikan perhatian serius bagi sekolah negeri maupun swasta.

¹² Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm.80.

¹³ Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm.360.

Departemen Agama berupaya memperjuangkan aspirasi umat Islam untuk mengembangkan pendidikan Islam, sekaligus mengembangkan pendidikan madrasah itu sendiri. Langkah awal yang ditempuh yaitu mengembangkan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri dan sekolah-sekolah swasta. Madrasah ketika itu diberikan pendidikan umum untuk menyeimbangkan antara pendidikan agama dan pengetahuan umum.

Semakin berkembangnya usaha Departemen Agama untuk meningkatkan pendidikan Islam dan madrasah, pemerintah kemudian mengupayakan pengkaderan guru-guru agama. Departemen Agama membuka pendidikan guru agama Islam yang diberi nama Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN)¹⁴. Pendidikan guru tersebut dipersiapkan untuk meningkatkan mutu madrasah dan pendidikan Islam di Indonesia.

2. Perkembangan Madrasah Masa Orde Baru

Kebijakan masa Orde Baru dalam bidang pendidikan agama termasuk madrasah bersifat meneruskan dan memperbaiki kebijakan masa Orde Lama. Madrasah masih berada dalam pengawasan Departemen Agama dan belum masuk dalam sistem pendidikan nasional. Sistem dualisme semakin nampak dalam pemerintahan ini. Pemerintah terus melakukan upaya untuk menghilangkan dualisme sistem pendidikan menuju mono sistem pendidikan. Hal itu sangat penting supaya tidak terjadi kesenjangan di dunia pendidikan.

Pemerintah berupaya melakukan formalisasi dan strukturisasi madrasah.¹⁵ Formalisasi dilakukan dengan menegerikan sejumlah madrasah, sedangkan strukturisasi dilakukan dengan mengatur jenjang dan kurikulum madrasah. Proses formalisasi sejumlah madrasah didukung oleh animo masyarakat terhadap pendidikan Islam. Masyarakat berkeinginan memperdalam ajaran Islam dan mendapatkan status yang sejajar dengan sekolah-sekolah lain agar mendapat kesempatan menduduki kursi dalam instansi-instansi.

Perkembangan madrasah masa Orde Baru dibagi dalam dua periode. Pertama, perkembangan madrasah sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Upaya untuk meningkatkan kualitas madrasah dalam penyelenggaraan kurikulum dan pengakuan untuk sejajar dengan sekolah lain, keluarlah keputusan pemerintah yang dikenal dengan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri (SKB 3 Menteri). SKB 3 Menteri itu dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 1975 di Jakarta oleh Menteri Agama RI, DR. Mukti Ali, MA, Nomor 6 Tahun 1975, Menteri P&K Nomor 037/U/1975, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1975.¹⁶

¹⁴ Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam: Perubahan Konsep, Filsafat dan Metodologi dan Era Nabi SAW sampai Ulama Nusantara*. (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), hlm.349.

¹⁵ Maksum, *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya*. (Jakarta: Logos Wacana, 1999), hlm. 132.

¹⁶ Alamsyah, *Pembinaan Pendidikan Agama*. (Jakarta: Depag RI, 1982), hlm.138.

Kedua, perkembangan madrasah dalam pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada dekade 80-an lahir peraturan baru tentang Sistem Pendidikan Nasional yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Undang-undang tersebut mengandung makna bahwa Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah mempunyai peran yang sama dengan pendidikan umum setingkat SD, SMP, dan SMA.¹⁷ Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah termasuk dalam kategori pendidikan dasar, sedangkan Madrasah Aliyah dikategorikan sebagai Sekolah Menengah Atas bercirikan Islam.

3. Latar Belakang Berdirinya Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah

Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1918 dengan nama *Al Qismul Arqo*. Pada tahun 1921 *Al Qismul Arqo* diubah menjadi Pondok Muhammadiyah, lalu tahun 1923 diubah lagi menjadi *Kweekschool* Islam dan tahun 1924 berubah menjadi *Kweekschool* Istri. Pada tahun 1924, *Kweekschool* Islam dipisah antara putra dan putri. *Kweekschool* Putra menjadi Madrasah Mu'allimin, sedangkan *Kweekschool* Putri menjadi Madrasah Mu'allimat.¹⁸

Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta merupakan madrasah dengan jenjang 6 tahun untuk membentuk calon pendidik dan pemimpin putri. Madrasah Mu'allimat terdiri dari Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah merupakan jenjang sekolah Menengah Atas setingkat dengan SMA, sedangkan Madrasah Tsanawiyah merupakan sekolah menengah pertama atau setingkat dengan SMP.

B. Perkembangan Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta masa Orde Baru (1974-1998)

1. Sistem Pendidikan

Pendidikan yang diselenggarakan Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta berpedoman pada tujuan pendidikan Muhammadiyah dan tujuan Pendidikan Nasional. Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta berada di bawah naungan Kementerian Agama yang menggunakan sistem yang telah ditetapkan secara nasional. Madrasah Mu'allimat sebagai madrasah yang dibentuk oleh organisasi Muhammadiyah juga tidak meninggalkan tujuan yang telah dicanangkan Muhammadiyah. Pihak Muhammadiyah melalui pimpinan Muhammadiyah Pusat tetap memberikan pengawasan penuh terhadap Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Madrasah Mu'allimat secara sadar mengkombinasikan antara Sistem Pendidikan Nasional dengan Sistem Pendidikan Muhammadiyah.

2. Kurikulum

Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta menggunakan struktur kurikulum yang merupakan perpaduan antara kurikulum Kementerian

¹⁷ Termuat dalam SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 26 Nomor 0487/U/1992 dan pasal 22 ayat 6 Nomor 0489/U/1992.

¹⁸ Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. *Booklet Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta*, (Yogyakarta: Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), hlm.2.

Agama dan kurikulum khas Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Semuanya disesuaikan dengan kurikulum yang dikeluarkan pemerintah, hanya saja di dalam Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta ditambah dengan pelajaran pekerjaan tangan dan kepandaian putri.¹⁹ Hal tersebut dilakukan karena Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta merupakan madrasah yang 100% peserta didiknya berjenis kelamin perempuan. Mata pelajaran pekerjaan tangan dan keputrian dirasa sangat penting untuk bekal dalam kehidupan rumah tangga maupun seni kerajinan yang memang dibutuhkan para perempuan.

Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta merupakan madrasah yang didirikan oleh organisasi Muhammadiyah. Pengawasannya dilakukan langsung oleh kantor pimpinan pusat Muhammadiyah. Dilihat dari segi kurikulum dan mata pelajaran, Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta memberikan mata pelajaran yang berkaitan dengan ke-Muhammadiyah. Materi ke-Muhammadiyah berisi ideologi dan sejarah organisasi Muhammadiyah.

Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta dalam tahap perkembangan kurikulum mengikuti pola perkembangan secara umum dan khusus. Umum berarti mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah dengan bercirikan khas agama Islam. Isi kurikulum tersebut mengembangkan pengayaan bidang studi umum, agama Islam dan pengembangan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Tipe khusus berarti Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta mengembangkan pola pendidikan dengan tipe keagamaan yang kuat. Materi keagamaan diberikan secara lebih komplit dan mendalam.

3. Sarana Prasarana

Sarana Prasarana Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pembangunan dilakukan secara bertahap sehingga menghasilkan suatu madrasah yang lengkap dan nyaman untuk proses pembelajaran. Peralatan yang digunakan untuk pembelajaran juga mengalami proses panjang dalam pemenuhan kebutuhan bagi murid-murid Madrasah Mu'allimat. Buku-buku, peralatan ekstrakurikuler, meja kursi dan peralatan lainnya menunjang proses belajar murid dengan sangat baik.

4. Tenaga Pengajar dan Peserta Didik

a. Tenaga Pengajar

Tenaga pengajar Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta mengalami naik turun dalam hal kuantitas. Rata-rata guru yang mengajar merupakan guru tidak tetap yang diangkat oleh Badan Pembina Harian Madrasah. Guru-guru tersebut terdiri dari guru struktural dan fungsional. Guru struktural merupakan guru-guru yang menduduki jabatan tinggi dalam sekolah sedangkan guru fungsional merupakan guru-guru yang mengajar di dalam kelas.

b. Peserta Didik

¹⁹ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Mutiara, 1979), hlm.277.

Peserta didik Madrasah Mu'allimat berasal dari berbagai latar belakang keluarga. Rata-rata termasuk dalam keluarga yang memiliki latar belakang Muhammadiyah sehingga memiliki persamaan tujuan dan visi misi dengan Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Pihak sekolah melakukan berbagai macam promosi melalui brosur, muktamar, dan promosi pada acara-acara penting Muhammadiyah untuk menunjang jumlah peserta didik.

C. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Orde Baru terhadap Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta

1. Perubahan Sistem Pendidikan pada Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta

a. Dampak SKB 3 Menteri bagi Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta

SKB 3 Menteri berdampak baik bagi madrasah-madrasah di Indonesia dalam hal kesetaraan. Madrasah memiliki tingkatan yang sama dengan sekolah-sekolah pada umumnya sesuai jenjang yang sudah diatur. Hal demikian memberikan dampak yang baik karena madrasah telah dipandang sebagai madrasah yang mampu bersaing dengan sekolah umum dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional. Ijazah madrasah juga mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum. Hal ini tidak menjadikan masyarakat ragu untuk menyekolahkan putra-putrinya di sebuah madrasah.

Dorongan masyarakat untuk mendapatkan ijazah secara formal menjadi salah satu pemicu bagi Madrasah Mu'allimat untuk menerapkan SKB 3 Menteri. Langkah Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta antara lain memasukkan kurikulum SKB 3 Menteri ke dalam kurikulum Mu'allimat jenjang Tsanawiyah dan Aliyah, mewajibkan murid-muridnya tinggal di asrama, dan mengintensifkan pengajaran Bahasa Inggris dan Bahasa Arab dengan tujuan mencetak peserta didik Mu'allimat yang handal.²⁰ Adanya langkah-langkah tersebut menjadikan Madrasah Mu'allimat memiliki status sama yang memudahkan bagi peserta didik untuk mendapatkan ijazah secara formal.

Pada tanggal 21 April 1978, Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta mendapatkan Piagam Madrasah melalui SK nomor 78/012/A/T untuk jenjang Tsanawiyah dan SK nomor 78/005/A/T untuk jenjang Aliyah.²¹ Piagam tersebut menerangkan bahwa Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta mendapatkan hak secara hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta diperbolehkan untuk mengikuti

²⁰ Madrasah Mu'allimin-Mu'allimat, *Profil Madrasah Mu'allimin Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta* dalam <http://ikmammm.wordpress.com/profil-madrasah-mu'allimin-mu'allimat-muhammadiyah> yogyakarta. Diakses pada 27 Mei 2016 pukul 12.30 WIB.

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Piagam Madrasah*. (Yogyakarta: Departemen Agama Bidang Pendidikan Agama Islam, 1978), tanpa halaman.

ujian persamaan madrasah negeri. Secara sah, Madrasah Mu'allimat terdaftar di Departemen Agama Republik Indonesia.

b. Dampak Kurikulum 1994 bagi Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta

Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurna Kurikulum 1984 yang dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989.²² Pada kurikulum 1994, jumlah jam pada mata pelajaran lebih banyak dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Mata pelajaran keagamaan seperti Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab wajib diberikan untuk menunjang pembentukan kepribadian muslim. Pada jenjang Tsanawiyah mata pelajaran agama bertambah karena mengurangi jam mata pelajaran muatan lokal. Materi Agama Islam mendapatkan porsi 9 jam perminggu, dan belum termasuk dengan materi agama lain seperti Qur'an Hadist, Fiqih Aqidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab.

Kurikulum 1994 bersamaan dengan dicanangkannya program wajib belajar 9 tahun. Madrasah Mu'allimat berupaya untuk mendukung program tersebut dengan membuka kesempatan belajar bagi masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya ke Mu'allimat jenjang Tsanawiyah. Pihak Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta mendapatkan porsi yang sama dengan sekolah lain dalam upaya ini. Mendapatkan bantuan buku-buku untuk menunjang proses pembelajaran.

Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta sebagai salah satu madrasah yang telah diakui pemerintah melaksanakan kurikulum 1994. Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta mengembangkan pengayaan bidang studi keagamaan yang sangat kuat disertai dengan kegiatan ketrampilan. Pihak Madrasah Mu'allimat berupaya keras untuk menyesuaikan kurikulum yang ada dengan madrasah negeri dan sekolah umum lain.

2. Dorongan melanjutkan ke Perguruan Tinggi

SKB 3 Menteri memberikan dampak lain bagi Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta berupa kesempatan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Adanya pengakuan ijazah secara formal menjadikan peserta didik Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta bisa melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Peserta didik yang berminat melanjutkan ke Perguruan Tinggi ternyata tidak sedikit. Banyak diantara mereka yang melanjutkan ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, IAIN, Universitas Islam Indonesia, dan lain sebagainya.

3. Lemahnya Kaderisasi Muhammadiyah

Usaha kaderisasi Muhammadiyah dilakukan melalui beberapa jalur.²³ Pertama, melalui jalur pendidikan yaitu melalui sekolah sekolah kader Muhammadiyah seperti sekolah Muhammadiyah dan Mu'allimin-Mu'allimat.

²² Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.154.

²³ *Ibid*, hlm.47.

Kedua, melalui jalur informal yaitu kaderisasi di dalam keluarga. Kaderisasi macam ini dilakukan karena pada dasarnya sebuah keluarga tersebut bergabung dalam organisasi Muhammadiyah. Ketiga yaitu melalui program-program khusus seperti diadakannya program Badan Pendidikan Kader dan program organisasi-organisasi di bawah Muhammadiyah.

Jalur-jalur kaderisasi Muhammadiyah dirasakan pula oleh Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kurun waktu 1940, 1950 dan 1960, Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta memiliki program yang mewajibkan para alumninya untuk menyebarkan Muhammadiyah ke daerah-daerah di Nusantara.²⁴ Mereka disebar ke perguruan-perguruan dan cabang-cabang Muhammadiyah yang ada di seluruh Indonesia. Usia peserta didik yang terhitung masih belasan tahun tergolong mampu dan siap untuk mengemban tugas sebagai kader Muhammadiyah. Ketika itu, pihak Madrasah Mu'allimat memang memberikan pendidikan kaderisasi guna mempermudah penyaluran cita-cita dan misi Muhammadiyah sendiri.

Memasuki periode 1970, terjadi perubahan alur cerita mengenai kaderisasi alumni Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Terjadi keterlambatan kesadaran dan fungsi di kalangan para alumni Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Hal tersebut terjadi karena adanya peraturan baru tentang madrasah dalam rangka persamaan kedudukan madrasah-madrasah non negeri dengan madrasah negeri dan sekolah umum. Secara khusus dijelaskan dalam SKB 3 Menteri pada kurikulum tahun 1976. Peraturan tersebut memudahkan peserta didik Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta untuk mendapatkan ijazah secara sah dan melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi.

Tuntutan untuk melanjutkan program ke Perguruan Tinggi dialami oleh peserta didik Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Hal itu menjadi semacam *trend* di kalangan masyarakat. Mereka lebih memilih untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi dibandingkan dengan melakukan program pengiriman alumni ke daerah-daerah di Indonesia.

Pembenoeman hilang begitu saja karena adanya perubahan pola pikir yaitu keinginan masyarakat untuk mendapat ijazah formal dan keinginan melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Mereka beranggapan bahwa melanjutkan sekolah ke Perguruan Tinggi lebih memiliki masa depan yang cerah daripada mengemban program pengiriman alumni. Pola pemikiran semacam ini tidak sejalan dengan visi-misi dan tujuan Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Hal inilah yang menyebabkan fungsi kaderisasi Muhammadiyah di dalam Madrasah Mu'allimat sedikit menurun dibandingkan dengan periode sebelumnya.

4. Adanya Tantangan Globalisasi

Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta merupakan lembaga pendidikan calon kader Muhammadiyah. Madrasah ini dibentuk berdasarkan cita-cita K.H. Ahmad Dahlan untuk mengembangkan pendidikan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Di samping hal itu, Madrasah Mu'allimat

²⁴ Manar Mas. Mu'allimim dan Problema Otomatisasi Fungsi Alumninya (Bagian Pertama dari Dua Tulisan). *Suara Muhammadiyah*. Yogyakarta. No. 22/79/1994., hlm.33.

diharapkan mampu menjadi madrasah yang menghasilkan alumni-alumni yang mengemban misi ke-Muhammadiyah.

Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta sejak awal berdiri diciptakan untuk menegakkan agama Islam. Seiring dengan perkembangan Muhammadiyah, masyarakat dan tantangan globalisasi, Madrasah Mu'allimat dituntut untuk menyikapi perubahan tersebut secara profesional.²⁵ Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta diharapkan mampu bertindak secara arif dan bijaksana tanpa meninggalkan identitasnya sebagai kader Muhammadiyah di masa depan. Upaya tersebut dilakukan dengan menciptakan peserta didik yang memiliki komitmen tinggi, berwawasan luas dan yang paling penting mengemban misi ke-Muhammadiyah.

Menghadapi arus globalisasi seperti derasnya arus budaya Barat, perkembangan sains dan teknologi yang semakin cepat, dan problematika keislaman di masyarakat menjadikan Madrasah Mu'allimat harus berjuang keras untuk menanggulangnya. Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta sebenarnya mempunyai tugas primer yang harus diemban peserta didiknya. Pertama, ada kewajiban moral untuk menyebarkan dakwah dengan komitmen yang dipegang Muhammadiyah.²⁶ Hal tersebut pada dasarnya bukan hanya tugas dari peserta didik Madrasah Mu'allimat saja, tetapi semua umat Islam memang wajib menyebarkan dakwah islamiah. Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta dianggap mampu dan memang hal itu merupakan salah satu tujuan dari pendidikan Madrasah Mu'allimat sendiri.

Kedua, sebagai masyarakat intelektual, Madrasah Mu'allimat diharuskan untuk bersikap kritis dan responsif terhadap segala fenomena perubahan dan perkembangan iptek atau peristiwa aktual yang sedang terjadi.²⁷ Peserta didik Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta mengembangkan ilmu yang mereka dapat dengan cara menyalurkan pengetahuannya kepada masyarakat. Kedua hal tersebut pada prakteknya akan terlaksana dengan baik apabila terdapat kerjasama yang baik antara peserta didik, tenaga pengajar, hingga para pemerhati Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Menjadi sesuatu yang mudah apabila diupayakan dengan baik, karena Madrasah Mu'allimat merupakan salah satu aset pendidikan bagi Muhammadiyah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang Muhammadiyah harapkan.

III. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

²⁵ *Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta*. (Yogyakarta: Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), hlm. 2.

²⁶ Maria Ulfah Azhar, *Mu'allimat, Mampukah Menjadi Gontornya Muhammadiyah?*. *Suara Muhammadiyah*. No.21/80/1995., hlm.45.

²⁷ *Ibid*, hlm.45.

1. Latar belakang berdirinya madrasah di Yogyakarta berkaitan dengan perkembangan madrasah masa sebelum Orde Baru, masa Orde Baru dan latar belakang berdirinya Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Sekolah Islam atau pendidikan Islam telah mengalami berbagai macam pembaharuan. Pendidikan Islam mengalami perubahan dan perkembangan format mulai dari langgar, masjid, pesantren hingga format pembaharuan yaitu dalam bentuk madrasah. Madrasah memiliki arti tempat belajar atau sekolah dengan nuansa Islam.

Madrasah masa Orde Lama belum masuk dalam sistem pendidikan nasional akan tetapi masih berada di bawah naungan Kementerian Agama. Hal ini disebabkan karena pendidikan madrasah belum didominasi oleh muatan-muatan agama, belum menggunakan kurikulum yang standar, memiliki struktur yang tidak seragam, dan kurang terpantau manajemen madrasah oleh pemerintah. Madrasah masa Orde Baru dalam bidang pendidikan agama termasuk madrasah bersifat meneruskan dan memperbaiki kebijakan masa Orde Lama. Pemerintah berupaya melakukan formalisasi dan strukturisasi madrasah. Formalisasi dilakukan dengan menegrikan sejumlah madrasah, sedangkan strukturisasi dilakukan dengan mengatur jenjang dan kurikulum madrasah.

Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta merupakan salah satu madrasah yang merasakan dampak dari kebijakan-kebijakan masa Orde Baru. Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta merupakan madrasah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1918 dengan nama *Al Qismul Arqo*. Pada tahun 1921, *Al Qismul Arqo* diubah menjadi Pondok Muhammadiyah, lalu tahun 1923 diubah lagi menjadi *Kweekschool* Islam dan tahun 1924 berubah menjadi *Kweekschool* Istri. Pada tahun 1924, *Kweekschool* Islam dipisah antara putra dan putri. *Kweekschool* Putra menjadi Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, sedangkan *Kweekschool* Putri menjadi Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Perkembangan Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta masa Orde Baru terdiri dari sistem pendidikan, kurikulum, sarana prasarana dan tenaga pengajar serta peserta didik. Sistem pendidikan yang diselenggarakan Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta masa Orde Baru berpedoman pada UU Sistem Pendidikan Nasional dan Qaidah Perguruan Muhammadiyah bab 1 pasal 3. Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta menggunakan struktur kurikulum yang merupakan perpaduan antara kurikulum Kementerian Agama dan kurikulum Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta dalam tahap perkembangan kurikulum mengikuti pola bercirikhas agama yang kuat disertai dengan pengetahuan umum dan ekstrakurikuler.

Sarana Prasarana Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pembangunan dilakukan secara bertahap sehingga menghasilkan suatu madrasah yang lengkap dan nyaman untuk proses pembelajaran. Peralatan yang digunakan untuk pembelajaran juga mengalami proses panjang dalam pemenuhan kebutuhan bagi murid-murid Madrasah Mu'allimat. Buku-buku, peralatan ekstrakurikuler, meja kursi dan peralatan lainnya menunjang proses belajar murid dengan sangat baik. Tenaga pengajar dan peserta didik Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta

mengalami naik turun dalam hal kuantitas. Rata-rata guru yang mengajar merupakan guru tidak tetap yang diangkat oleh Badan Pembina Harian Madrasah. Guru-guru tersebut terdiri dari guru struktural dan fungsional. Peserta didik Madrasah Mu'allimat berasal dari berbagai latar belakang keluarga. Rata-rata termasuk dalam keluarga yang memiliki latar belakang Muhammadiyah sehingga memiliki persamaan tujuan dan visi misi dengan Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta.

3. Pemerintahan Orde Baru mengeluarkan kebijakan-kebijakan pendidikan yang diikuti oleh Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Salah satu kebijakan yang sangat berpengaruh ialah Surat Keputusan Bersama 3 Menteri (SKB 3 Menteri). Pada tanggal 21 April 1978, Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta mendapatkan Piagam Madrasah melalui SK nomor 78/012/A/T untuk jenjang Tsanawiyah dan SK nomor 78/005/A/T untuk jenjang Aliyah. Piagam tersebut menerangkan bahwa Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta mendapatkan hak secara hukum untuk menyelenggarakan pendidikan, pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan madrasah negeri yang dapat digunakan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dampak positif SKB 3 Menteri berbanding terbalik dengan fungsi kaderisasi Muhammadiyah yang selama ini diprogramkan oleh Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Kesempatan mendapatkan ijazah secara formal dan kesempatan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi menjadi latar belakang kurangnya minat peserta didik untuk dikirim ke daerah dalam rangka kaderisasi Muhammadiyah. Mereka lebih memilih melanjutkan ke Perguruan Tinggi dengan harapan akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dibandingkan mengabdikan ke daerah.

Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta mencoba melakukan beberapa upaya untuk mengembalikan fungsi kaderisasi Muhammadiyah serta dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi. Beberapa program seperti pengembangan kurikulum 1994, program mengajar di SD Muhammadiyah dan program Dakwah menjadi sarana dalam menyalurkan bakat dan ide dari kader-kader Muhammadiyah yang dibentuk Madrasah Mu'allimat. Selama berada di dalam Madrasah Mu'allimat, guru-guru memberikan bekal pengetahuan umum, agama dan ke-Muhammadiyah yang bertumpu pada Al-Qur'an dan Sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

- [1]. Departemen Agama Republik Indonesia. (1978). *Piagam Madrasah Tsanawiyah*. Yogyakarta.
- [2]. Departemen Agama Republik Indonesia. (1978). *Piagam Madrasah Aliyah*. Yogyakarta.

Buku

- [3]. Alamsyah. (1982). *Pembinaan Pendidikan Agama*. Jakarta: Depag RI.

- [4]. B. J. Boland. (1985) *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970*. Jakarta: Grafiti Press.
- [5]. Gottschalk, Louis. (1986). *Understanding History: A Prime of Historical Method*, a.b. Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- [6]. Haidar Putra Daulay. (2007). *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- [7]. Jurusan Pendidikan Sejarah. (2013). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah FIS UNY*. Yogyakarta: Prodi Pendidikan Sejarah FIS UNY.
- [8]. Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- [9]. Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. (2015). *Booklet Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta*, Yogyakarta: Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta.
- [10]. Mahmud Yunus. (1979). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Mutiara.
- [11]. Maksum. (1999). *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos Ilmu.
- [12]. Ramayulis. (2011). *Sejarah Pendidikan Islam: Perubahan Konsep, Filsafat dan Metodologi dan Era Nabi SAW sampai ulama Nusantara*. Jakarta: Kalam Mulia..
- [13]. Suhartono W. Pranoto. (2010). *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [14]. Yunahar Ilyas, M Masyhur Amin, M Daru Lalito. (1994). *Muhammadiyah dan NU*. Yogyakarta: LPPI UMY.

Internet

- [15]. Madrasah Mu'allimin-Mu'allimat, *Profil Madrasah Mu'allimin Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta* dalam <http://ikmammm.wordpress.com/profil-madrasah-mu'allimin-mu'allimat-muhammadiyah-yogyakarta>. Diakses pada 27 Mei 2016 pukul 12.30 WIB.

Majalah

- [16]. Manar Mas. (1994). Mu'allimin dan Problema Otomatisasi Fungsi Alumninya (Bagian Pertama dari Dua Tulisan). *Suara Muhammadiyah*. No.22/79/1994.
- [17]. Maria Ulfah Azhar. (1995). Mu'allimat, Mampukah Menjadi Gontornya Muhammadiyah?. *Suara Muhammadiyah*. No. 21/80/1995.

Reviewer

Zulkarnain, M.Pd
NIP. 19740809 200812 1 001

Yogyakarta, Juli 2016
Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Dyah Kumalasari, M.Pd
NIP. 19770618 200312 2 001